

Analisis dan Implementasi Pengelolaan Keuangan pada Yayasan

Anwar SA¹, Fadli Faturrahman²

^{1,2}Kewirausahaan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa

Email: ¹anwar@uts.ac.id, ²fadli.faturrahman@uts.ac.id

Abstract

One non-profit organization that exists in Indonesia is a foundation, a legal entity that is not profit-oriented. Accountability itself is a form of responsibility towards the provider of resources (donors). The financial reporting of a foundation refers to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) No.35. The purpose of this research is to analyze the implementation of accountability and the financial management implementation of Yayasan Al Ashola Al Islamiyah Sumbawa in accordance with ISAK 35 guidelines. The analysis tools used include interview results, documentation, and financial reports of the Foundation. The research results show that the research object has not implemented Accountability in financial reporting because only two indicators can be applied by the Foundation. As for financial reporting, the research object has not implemented it in accordance with the Financial Accounting Standards ISAK 35 due to several factors such as the Foundation's young age, financial experts who are unfamiliar with ISAK 35, and the Foundation has never conducted bookkeeping and inventory of assets. The financial reports owned by the Foundation are still limited to simple reports such as cash inflows and outflows.

Keywords: *Accountability, Finance, Management, Financial Accounting Standards ISAK 35, Foundation.*

Abstrak

Satu organisasi nonlaba yang ada di Indonesia adalah yayasan, suatu badan hukum yang tidak berorientasi terhadap keuntungan. Akuntabilitas sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pemberi sumber daya (donatur). Pelaporan keuangan sebuah yayasan mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan implementasi pengelolaan keuangan Yayasan Al Ashola Al Islamiyah Sumbawa terhadap panduan ISAK 35. Alat analisis yang digunakan berupa hasil wawancara, dokumentasi serta laporan keuangan Yayasan. Hasil penelitian, objek penelitian belum menerapkan Akuntabilitas pada pelaporan keuangan karena hanya dua indikator yang dapat diterapkan oleh Yayasan. Sedangkan terkait pelaporan keuangan, objek penelitian belum menerapkan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 dikarenakan beberapa faktor seperti usia Yayasan yang masih baru, tenaga ahli keuangan yang masih asing terhadap ISAK 35, serta yayasan belum pernah melakukan pembukuan dan inventaris terhadap aset. Laporan keuangan yang dimiliki Yayasan masih sebatas laporan sederhana berupa laporan kas masuk dan kas keluar.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan, Pengelolaan, Standar Akuntansi ISAK 35, Yayasan

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, perkembangan dan transformasi juga terjadi di segala aspek kehidupan tak terkecuali pada pengelolaan keuangan di Indonesia yang sudah mengarah dan memasuki era akuntansi publik. Prinsip Akuntabilitas pada masa sekarang bukanlah menjadi kewajiban lembaga pemerintah atau swasta saja, namun berlaku untuk seluruh organisasi – organisasi lainnya tak terkecuali entitas berorientasi nonlaba.

Menurut Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35), karakteristik entitas berorientasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.

Dari perbedaan entitas berorientasi nonlaba dengan entitas berorientasi laba dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan entitas berorientasi nonlaba sebagai bukti bahwa tidak ada penyelewengan dana yang akan disajikan kepada masyarakat dan para donatur sehingga sebagai transparansi pelaporan keuangan yang baik terhadap dana yang telah dikelola entitas tersebut.

Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu karakteristik yang harus diperankan oleh organisasi nonlaba, hal ini dikarenakan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang menyebabkan entitas nonlaba di Indonesia masih belum menerapkan akuntabilitas secara keseluruhan dalam mempertanggungjawabkan dana entitas serta faktor yang menyebabkan entitas nonlaba masih belum mampu menyajikan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kurangnya SDM tenaga akuntan yang menguasai ilmu pelaporan keuangan.

Menanggapi permasalahan ini sosialisasi dan pendampingan sangat dibutuhkan bagi tenaga penyusun laporan keuangan (bendahara) pada setiap entitas nonlaba agar kedepannya dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik. Dari observasi awal yang dilakukan pada Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah di temukan hasil bahwa Yayasan belum menerapkan komponen akuntabilitas secara keseluruhan serta penyusunan laporan keuangan belum memenuhi standar keuangan akuntansi yang berlaku di Indonesia saat ini. Rumusan masalah yang ingin diteliti adalah melihat bagaimana penerapan akuntabilitas dan implementasi pelaporan keuangan Yayasan Al Ashola Al Islamiyah Sumbawa terhadap panduan ISAK 35 ?

2. KAJIAN TEORI

Akuntabilitas

Menurut Yesika, 2020 Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yakni:

1. Akuntabilitas Vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas yang paling tinggi.
2. Akuntabilitas Horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga setara.

Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas dapat dikatakan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan, penyusunan dan pelaporan keuangan suatu entitas apakah telah berjalan dengan baik dan sesuai pedoman. Adapun 5 indikator yang digunakan Badan Penyelenggara Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mengukur Akuntabilitas, diantaranya yaitu :

1. Adanya standard operating procedure (SOP) dalam penyelenggaraan
2. Sistem pengawasan
3. Mekanisme pertanggungjawaban
4. Laporan tahunan
5. Mekanisme evaluasi reward and punishment

Yayasan

Yayasan adalah salah satu bentuk entitas nirlaba. Yayasan memiliki orientasi yang berbeda – beda sesuai dengan tujuan yayasan tersebut. Namun sebagian besar yayasan yang kita jumpai adalah yayasan yang berorientasi pada pendidikan atau keagamaan bahkan keduanya seperti sekolah, masjid, kelompok pengajian dan pondok pesantren.

Dalam melaksanakan kegiatan awal, sebuah yayasan memiliki kekayaan sendiri yang dihimpun dari harta pemilik yayasan maupun pengurus. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 32 angka 3 disebutkan bahwa Susunan pengurus Yayasan sekurang – kurangnya terdiri dari :

- a. Seorang ketua ;
- b. Seorang sekertaris ; dan
- c. Seorang bendahara

Jumlah kekayaan awal yayasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 PP no. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU tentang yayasan bahwa jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh WNI paling sedikit senilai Rp 10.000.000,- dan untuk jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama WNI paling sedikit senilai Rp 100.000.000.- (Perpu, 2008).

Laporan keuangan ISAK 35

Pada suatu yayasan, laporan keuangan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi donatur apakah entitas tersebut dapat diamanahkan untuk mengelola harta yang akan diberikan. Pelaporan keuangan sebuah yayasan sebagai salah satu entitas nonlaba mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang efektif berlaku pada 1 Januari 2020.

Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan yang harus disusun suatu yayasan sebagai sebuah entitas nonlaba ada 5 yaitu : laporan posisi keuangan, laporan penghasilan

komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan:

1. Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menjelaskan mengenai adalah laporan yang menjelaskan mengenai posisi asset, liabilitas dan asset bersih pada waktu tertentu. Menurut ISAK 35 terdapat dua format dalam menyajikan laporan posisi keuangan yaitu format A dan format B dimana masing – masing format memiliki kelebihan masing – masing. Pada format A terdapat pos penghasilan komprehensif lain pada bagian asset neto, sedangkan pada format B pos penghasilan komprehensif tidak disajikan.
2. Laporan penghasilan komprehensif
Laporan penghasilan komprehensif adalah laporan keuangan yang menginformasikan terkait pendapatan dan beban kemudian dilihat apakah terjadi surplus atau deficit (laba atau rugi) dalam laporan penghasilan komprehensif. Dalam penyajiannya juga terdapat dua bentuk format laporan keuangan yaitu format A dan format B. Perbedaan diantara keduanya yaitu pada format A informasi disajikan dalam bentuk kolom tunggal sedangkan pada format B disajikan secara spesifik dengan pembatasan atau tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya.
3. Laporan perubahan asset neto
Laporan perubahan asset neto adalah laporan yang menyajikan informasi asset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan juga asset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.
4. Laporan arus kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan pengeluaran dan penerimaan kas dan juga setara kas selama periode tertentu yang sudah dikelompokkan di dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan adalah suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan – laporan keuangan yang ada diatas. Memiliki tujuan untuk dapat memberi suatu informasi tambahan tentang hal – hal yang telah dinyatakan dalam laporan keuangan diatas.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2019) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah yang dikumpulkan dari data yang berbentuk kata–kata, kalimat, dokumen, maupun arsip yang menyangkut judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu: Data Primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder berupa laporan keuangan Yayasan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu Observasi Wawancara dan Dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data baru kemudian melakukan penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Yayasan

Dalam analisis akuntabilitas pada pengelolaan keuangan ini, penulis menggunakan hasil wawancara sebagai alat analisis terhadap indikator akuntabilitas ini sendiri. Terdapat lima indikator untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah Sumbawa;

1. Adanya Standar Operating Procedur (SOP) dalam penyelenggaraan Standar Operating Procedur (SOP) merupakan sebuah komponen yang harus dimiliki dalam sebuah entitas, hal ini dikarenakan SOP adalah acuan seluruh pihak yang terlibat dalam entitas tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga tercapailah tujuan bersama yang sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam visi dan misi entitas.
Pengelolaan keuangan Yayasan masih belum memiliki Standar Operating Procedur (SOP) dikarenakan usia Yayasan yang belum lama sehingga untuk pembuatan SOP semuanya masih dalam tahap penyusunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan keuangan Yayasan Al-Asholah Al-Islamiah Sumbawa belum memenuhi indikator pertama akuntabilitas pelaporan keuangan yaitu adanya SOP dalam penyelenggaraan.
2. Sistem pengawasan
Sistem pengawasan adalah suatu metode yang diterapkan dalam sebuah entitas untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan oleh setiap bagian sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
Secara struktur Yayasan sudah memiliki tim pengawas namun dalam hal pelaporan keuangan pengawasan belum optimal dilakukan. Karena Tim Pengawas Yayasan hanya melakukan pengamatan terhadap sistem operasional atau pembelanjaan dana, belum sampai kepada Pelaporan keuangannya secara mendetail. Dapat disimpulkan bahwa Pelaporan keuangan Yayasan belum menerapkan indikator kedua dari akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu sistem pengawasan.
3. Mekanisme Pertanggung Jawaban
Mekanisme Pertanggung Jawaban merupakan sebuah alur akhir dari pelaporan keuangan setelah Bendahara entitas menyusun laporan keuangan maka selanjutnya akan dilaporkan kepada pihak entitas yang berwenang untuk mengetahui laporan keuangan tersebut.
Staf Administrasi keuangan menyusun pelaporan keuangan dan menyerahkan kepada Ketua Yayasan dan diperiksa, lalu setelah dirasa sudah benar maka Ketua Yayasan langsung menyerahkan kepada Pembina Yayasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yayasan Al-Asholah Al-Islamiah Sumbawa sudah menerapkan indikator ketiga dari akuntabilitas pelaporan keuangan yaitu Mekanisme pertanggungjawaban.
4. Laporan tahunan
Laporan Tahunan merupakan sebuah laporan keuangan yang disajikan dengan tempo satu tahun, laporan inilah yang akan memperlihatkan kondisi keuangan sebuah entitas atau organisasi dalam perjalanan operasional periode satu tahun.
Dari hasil wawancara bersama Bendahara Yayasan dan Staf Administrasi Keuangan Yayasan, diketahui bahwa Yayasan Al-Asholah Al-Islamiah Sumbawa belum memiliki laporan keuangan dikarenakan usia Yayasan belum mencapai satu tahun. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Yayasan belum menerapkan indikator keempat dalam akuntabilitas pelaporan keuangan.
5. Mekanisme evaluasi reward dan punishment
Evaluasi reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja setiap bidang dalam suatu entitas. Penghargaan diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dalam menjalankan tugas dan kewajiban kedepannya. Sedangkan hukuman diharapkan dapat menjadi tolak ukur peringatan terhadap kinerja kedepannya agar menjadi lebih baik.
Evaluasi terhadap pelaporan keuangan dilakukan ketika menemukan kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan, selain itu Yayasan Al-Asholah Al-Islamiah Sumbawa juga rutin melakukan evaluasi keseluruhan setiap tahunnya sejak masih dalam bentuk lembaga. Namun untuk bentuk nyata dari reward dan punishment Ketua Yayasan tidak

menjelaskan dengan rinci. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kelima dari akuntabilitas pelaporan keuangan ini sudah diterapkan dalam Yayasan.

Analisis Laporan Keuangan sesuai standar ISAK 35

Dari analisis laporan keuangan diatas penulis mendapatkan hasil bahwa laporan keuangan Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah Sumbawa belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku saat ini. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah masih berupa laporan sederhana yang berisi kas keluar dan kas masuk meskipun secara judul tabel berjudul Jurnal Umum namun akun – akun yang digunakan belum sesuai dengan standar akuntansi pada umumnya. Sedangkan dalam pelaporan keuangan sesuai standar Akuntansi Keuangan di dalamnya terdapat perhitungan aset, liabilitas, dal lain sebagainya.

Terkait pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi ISAK 35 yang terdiri dari 5 komponen, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Posisi Keuangan
Pada laporan pertama ini, aset lancar diperoleh dari kas, piutang, dan perlengkapan dengan total senilai Rp 43.453.000. Sedangkan untuk pos aset tidak lancar dan liabilitas dikosongkan karena tidak terdapat dalam Laporan Keuangan yang disajikan Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah Sumbawa.
2. Laporan Penghasilan Komprehensif
Pada laporan penghasilan komprehensif ini, kondisi keuangan Yayasan mengalami defisit dikarenakan jumlah beban lebih besar daripada jumlah pendapatan. Adapun jumlah pendapatan pada bulan Oktober tercatat sebesar Rp 50.625.000 dan beban tercatat sebesar Rp 59.661.500 sehingga menghasilkan defisit sebesar -Rp 9.036.500.
3. Laporan Perubahan Aset Neto
Pada laporan aset neto, penulis menggunakan sistem cut off dimana perhitungan modal awal pada Bulan Oktober merupakan modal yang diakumulasikan dari bulan sebelumnya, tercatat sebesar Rp 52.489.500 dikurangi jumlah defisit yang dihasilkan pada bulan Oktober sebesar –Rp 9.063.500 sehingga diperoleh saldo akhir kas sebesar Rp 43.453.000. Pada Laporan Perubahan Aset Neto, masih banyak akun – akun yang belum terisi dikarenakan akun – akun tersebut belum dimiliki oleh Laporan Keuangan Yayasan Al-Asholah All-Islamiyah Sumbawa.
4. Laporan Arus Kas
Pada Laporan Arus Kas, diketahui bahwa terjadinya penurunan jumlah Kas pada akhir periode disebabkan oleh deficit yang terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp 9.063.500 ditambah dengan kenaikan piutang sebesar Rp 5.600.000, kenaikan perlengkapan Rp 3.461.000, hal ini akan menjadi pengurangan kas, kemudian menjadi pengurangan dari Saldo awal kas sebesar Rp 52.489.500 sehingga diperoleh hasil akhir saldo kas sebesar Rp 34.392.000 sesuai dengan saldo akhir kas pada pelaporan asli yang disajikan Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah Sumbawa.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Pada laporan keuangan Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah belum memiliki CaLK. CaLK juga masih belum dapat disajikan karena akun – akun yang dimiliki Laporan Keuangan Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah masih bersifat umum dan tidak terperinci.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaporan keuangan, Yayasan Al-Asholah Al-Islamiyah Sumbawa belum menerapkan Akuntabilitas pada pelaporan keuangan. Pada indikator pertama mengenai adanya

Standar Operating Procedure (SOP) yayasan belum menerapkannya. Untuk sistem pengawasan yang merupakan indikator kedua yayasan juga belum menerapkannya. Pada indikator ketiga yaitu Mekanisme Pertanggungjawaban, yayasan sudah menerapkannya dilihat dari alur pelaporan keuangannya. Sedangkan indikator keempat mengenai Laporan Tahunan belum dapat diterapkan. Pada indikator terakhir kelima tentang Mekanisme Evaluasi Reward dan Punishment yayasan telah menerapkannya. Penyebab tidak diterapkannya pelaporan keuangan secara akuntabilitas dikarenakan usia Yayasan yang masih baru masih dalam proses pembentukan dan penyelesaian masalah internal berupa penempatan sumber daya manusia.

2. Terkait pelaporan keuangan, Yayasan Al-Asholah Al-Islamiah Sumbawa belum menerapkan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 dikarenakan beberapa faktor seperti usia Yayasan yang masih baru, tenaga ahli keuangan yang masih asing terhadap ISAK 35, serta yayasan belum pernah melakukan pembukuan dan inventaris terhadap aset, dan lainnya. Laporan keuangan yang dimiliki Yayasan masih sebatas laporan sederhana berupa laporan kas masuk dan kas keluar.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, terkait akuntabilitas penulis menyarankan agar Yayasan Al-Asholah Al-Islamiah segera memiliki SOP dalam bentuk berkas baku sehingga setiap bagian dalam Yayasan dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama pada pelaporan keuangan Yayasan. Kedepannya, Yayasan diharapkan membuat laporan tahunan untuk memudahkan donatur dalam melihat alur alokasi dana tahunan. Selanjutnya, Yayasan juga diharapkan mampu menerapkan pengawasan yang jelas terhadap pelaporan keuangan Yayasan sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi kekeliruan dalam pelaporan sebelum diserahkan kepada pihak teratas dalam sebuah entitas.
2. Kemudian terkait dengan Standar Akuntansi pelaporan keuangan, yayasan Al-Asholah Al-Islamiah Sumbawa diharapkan dapat menyajikan penerapan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi ISAK 35 sebagai acuan pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba salah satunya yaitu Yayasan. Agar tersaji laporan keuangan yang lebih baik dan tentunya mengikuti Standar yang berlaku. Serta Yayasan diharapkan mengikutsertakan bagian pengelola keuangan dalam kegiatan pelatihan terkait Pelaporan Keuangan sesuai dengan standar untuk memperkaya pengetahuan dalam mengelola Laporan Keuangan Yayasan kedepannya. Kemudian, dalam menyusun Laporan Keuangan diharapkan menyusun dimulai dari sisa saldo bulan sebelumnya.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk memilih objek penelitian yang memiliki laporan keuangan lengkap mulai dari data aset, liabilitas dan ekuitas agar memudahkan dalam pengolahan data dan penelitian.

6. DAFTAR RUJUKAN

- IAI, D. (2018). Draft eksposur ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Ikatan Akuntan Indonesia. www.iaiglobal.or.id
- Lalolo, Loina. (2013). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Jakarta : Sekretariat Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Perpu. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Tentang Yayasan. Ngada.Org, 134.

- Sugiyono. (2019). Masalah, focus, judul, dan teori dalam penelitian kualitatif. In Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (pp. 272-329)
- Yanuarisa, Yesika. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya. Balance : Vol. 12 No. 2 Juli 2020